



Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Rifki Listianto

Bentuk Satgas dan Edukasi Masyarakat Kelola Sampah

Pengelolaan sampah menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. PR itu dinilai belum sepenuhnya bisa terpecahkan. Menyadari peliknya masalah yang mengemuka, perlu peran aktif dari berbagai pihak.



RIFKI LISTIANTO
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta

Pembentukan satgas perlu diikuti dengan penetapan status darurat sampah. Dukungan anggaran sangat diperlukan karena pengelolaan sampah membutuhkan penanganan segera."

"PEMERINTAH daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum," ucap Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Rifki Listianto kemarin (24/7). Dia juga menilai perlunya membentuk satuan tugas (satgas) untuk penguatan koordinasi antarlembaga. Ini sekaligus solusi jangka pendek penanganan sampah. Langkah itu sama seperti saat pandemi Covid-19. Kehadiran satgas dinilai cukup efektif menekan laju penularan virus. Saat itu juga ada kebijakan status darurat dan *refocusing* anggaran. "Pembentukan satgas perlu diikuti dengan penetapan status darurat sampah," katanya. Satgas berperan membantu penanggulangan sampah selama darurat sampah diberlakukan. Darurat sampah diterapkan dengan arah mengurangi produksi sampah. Satgas juga berfungsi memberikan edukasi ke masyarakat cara mengelola sampah. Sekaligus melakukan penindakan kepada para pembuang sampah sembarangan bila diperlukan. Wakil rakyat yang tinggal di kawasan Patehan Kidul, Kraton, Yogyakarta ini menilai penanganan sampah yang dilakukan pemerintah daerah belum optimal. Itu terlihat dari kebijakan alokasi anggaran penanganan sampah masih cukup rendah. Datanya dari usulan yang diajukan Pemkot Yogyakarta di APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2024 hanya Rp 7,4 miliar. Itu dipakai membeli dua unit insenerator atau mesin pengolah sampah. "Dukungan anggaran sangat diperlukan karena pengelolaan sampah membutuhkan penanganan segera," desaknya. Total anggaran perubahan mencapai Rp 175 miliar. Usulan mesin pengolah sampah itu dinilai relatif kecil dibandingkan kegiatan lainnya. Misalnya sebagai pembandingan dengan rencana pengadaan tanah ruang terbuka hijau publik (RTHP) di Kelurahan Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, sebesar Rp 12,5 miliar. Rifki berpendapat pengadaan RTHP itu belum cukup mendesak. "Masalah yang lebih penting dan segera harus diselesaikan sampah," ingat anggota badan anggaran DPRD Kota Yogyakarta ini. Saat ini masyarakat menaruh harapan besar agar pemkot mampu menuntaskan masalah sampah. Namun dia menilai keberpihakan dan politik anggaran dari pemkot dinilai masih minimal. Indikasinya, usulan anggaran lebih sedikit dibandingkan usulan pembelian tanah untuk RTHP Muja Muju. Dia juga menagih janji pemkot yang menargetkan penyelesaian sampah tuntas pada Juni. Realitanya hingga Juli ini sejumlah depo sampah masih penuh dan banyak ditemukan sampah di beberapa sudut kota. "Itu membikin tambah prihatin," sesalnya. (Inu/kus/by)

APBD PERUBAHAN: Di tengah persoalan sampah yang belum tuntas, Pemkot Yogyakarta diminta memprioritaskan anggaran untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan sampah. Perlu ada skala prioritas anggaran dibandingkan dengan usulan pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau publik (RTHP).
 GURUR ADA TITIKARADAR JOGA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005